
**MODEL PENGELOLAAN KAMPUNG ADAT KAPER SEBAGAI DAYA TARIK WISATA
BUDAYA BERBASIS MASYARAKAT DI DESA GOLO BILAS KABUPATEN MANGGARAI
BARAT**

Fransisco Dei Graciano Gadu¹, Primus Gadu²

¹Universitas Udayana Bali, Indonesia

²Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, Indonesia

E-mail: ¹Secundagratia156@gmail.com, ²primusgadu201@gmail.com

Article History:

Received: 14-04-2026

Revised: 02-05-2026

Accepted: 15-05-2026

Keywords:

*Community Based
Tourism, Kampung Adat
Kaper, Pengelolaan
Destinasi, Pariwisata
Budaya, Fungsi
Manajemen.*

Abstract: *Pengelolaan destinasi wisata budaya berbasis masyarakat merupakan strategi penting dalam mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan melalui pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat lokal. Kampung Adat Kaper di Desa Golo Bilas, Kabupaten Manggarai Barat, memiliki potensi wisata budaya berupa Mbaru Gendang, Compang, Lingko, ritual Penti, dan atraksi Tari Caci. Namun, pengelolaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya kelembagaan pengelola, keterbatasan pendanaan, dan belum optimalnya kolaborasi antarpemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis model pengelolaan Kampung Adat Kaper berdasarkan fungsi manajemen (planning, organizing, actuating, dan controlling) serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Kampung Adat Kaper telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen melalui pengembangan atraksi budaya, kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga adat, dan sanggar budaya, serta partisipasi aktif masyarakat. Namun, implementasinya belum optimal karena belum didukung oleh masterplan pengembangan destinasi, kelembagaan yang kuat, dan sistem pengawasan yang terstruktur.*

PENDAHULUAN

Pariwisata budaya merupakan salah satu bentuk pariwisata yang berkembang pesat karena mampu menghadirkan pengalaman autentik melalui interaksi wisatawan dengan budaya, tradisi, sejarah, dan kehidupan masyarakat lokal. Dalam paradigma pembangunan pariwisata berkelanjutan, budaya tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing destinasi, tetapi juga sebagai identitas sosial yang harus dilestarikan untuk menjamin keberlanjutan nilai-

nilai lokal bagi generasi mendatang. UN Tourism menegaskan bahwa warisan budaya berwujud maupun tidak berwujud (*tangible* dan *intangible cultural heritage*) merupakan sumber daya strategis dalam pembangunan destinasi wisata yang mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus memperkuat identitas masyarakat lokal. Sejalan dengan itu, konsep *Community Based Tourism* (CBT) menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan pariwisata sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan (Goodwin, 2017; Suansri, 2003). Oleh karena itu, pengembangan wisata budaya tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat, pelestarian budaya, dan tata kelola destinasi yang berkelanjutan.

Kabupaten Manggarai Barat, khususnya kawasan Labuan Bajo, merupakan salah satu destinasi pariwisata unggulan nasional yang ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Selama ini pengembangan pariwisata di kawasan tersebut lebih dikenal melalui wisata bahari dan keberadaan Taman Nasional Komodo. Namun demikian, kawasan ini juga memiliki potensi wisata budaya yang sangat besar, salah satunya adalah Kampung Adat Kaper yang terletak di Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Kampung adat ini masih mempertahankan berbagai elemen budaya asli masyarakat Manggarai, seperti Mbaru Gendang (rumah adat), Compang (altar adat), Wae Barong (mata air sakral), Lingko (lahan adat), ritual adat, serta kesenian tradisional seperti Tari Caci dan Rangkuk Alu yang hingga kini masih dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Keberadaan berbagai warisan budaya tersebut memberikan keunikan dan diferensiasi destinasi yang berpotensi memperkaya produk wisata Labuan Bajo. Akan tetapi, hasil observasi awal menunjukkan bahwa potensi tersebut belum dikelola secara optimal akibat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum terbentuknya kelembagaan pengelola yang profesional seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), rendahnya kemampuan promosi digital, keterbatasan pendanaan, serta belum optimalnya sinergi antara pemerintah desa, lembaga adat, sanggar budaya, dan pelaku industri pariwisata. Kondisi tersebut menyebabkan potensi wisata budaya Kampung Adat Kaper belum mampu memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat lokal sekaligus belum sepenuhnya mendukung upaya pelestarian budaya di tengah perkembangan industri pariwisata Labuan Bajo.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan destinasi wisata budaya sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan tingkat partisipasi masyarakat lokal. Penelitian I Gede Pitana dan Diarta (2009) menjelaskan bahwa pengelolaan pariwisata harus berorientasi pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan. Penelitian Goodwin (2017) menegaskan bahwa pendekatan *Community Based Tourism* mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan destinasi. Selanjutnya, penelitian-penelitian mengenai

pengembangan kampung adat di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan destinasi wisata budaya dipengaruhi oleh kekuatan kelembagaan lokal, kualitas sumber daya manusia, promosi digital, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada identifikasi potensi wisata budaya, pemberdayaan masyarakat, atau strategi pengembangan destinasi secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji model pengelolaan Kampung Adat Kaper dengan mengintegrasikan fungsi manajemen dan pendekatan *Community Based Tourism* masih sangat terbatas. Dengan demikian, terdapat research gap, yaitu belum adanya kajian yang menganalisis secara komprehensif bagaimana model pengelolaan Kampung Adat Kaper dibangun melalui fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat lokal.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pengelolaan Kampung Adat Kaper sebagai daya tarik wisata budaya berbasis masyarakat di Desa Golo Bilas, Kabupaten Manggarai Barat. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk pengelolaan destinasi yang telah diterapkan, menganalisis peran pemerintah desa, lembaga adat, sanggar budaya, dan masyarakat dalam pengelolaan destinasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Kampung Adat Kaper. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian pengelolaan destinasi wisata budaya berbasis masyarakat, sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah, pengelola destinasi, dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan model pengelolaan kampung adat yang berkelanjutan, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

LANDASAN TEORI

1. Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan pariwisata merupakan proses yang sistematis dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh sumber daya destinasi agar mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara berkelanjutan. Menurut I Gede Pitana dan Diarta (2009), pengelolaan pariwisata harus berlandaskan pada prinsip keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan, pelestarian budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Konsep tersebut menegaskan bahwa keberhasilan suatu destinasi tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari kemampuan destinasi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya yang dimilikinya.

Pandangan tersebut diperkuat oleh UN Tourism (2024) yang menyatakan bahwa pengelolaan destinasi merupakan suatu proses kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan pariwisata yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Sementara itu,

Global Sustainable Tourism Council (2023) menekankan bahwa tata kelola destinasi yang baik harus memenuhi empat dimensi utama, yaitu pengelolaan destinasi (*sustainable destination management*), manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat lokal, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan destinasi tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif, tetapi juga oleh efektivitas kolaborasi antarpemangku kepentingan dan penerapan prinsip keberlanjutan.

Selanjutnya, Dredge dan Jenkins (2007) memandang pengelolaan pariwisata sebagai proses *governance* yang menitikberatkan pada koordinasi antaraktor dalam merumuskan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan pembangunan pariwisata. Perspektif ini dipertegas oleh Hall (2008) yang menyatakan bahwa tata kelola destinasi merupakan bentuk jejaring kolaboratif yang menghubungkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga lainnya dalam mencapai tujuan pembangunan pariwisata secara bersama. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, penelitian ini mensintesis bahwa pengelolaan pariwisata merupakan suatu sistem tata kelola kolaboratif yang mengintegrasikan fungsi manajemen, partisipasi masyarakat, dan prinsip keberlanjutan untuk meningkatkan daya saing destinasi sekaligus menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Sintesis ini menjadi landasan dalam menganalisis model pengelolaan Kampung Adat Kaper sebagai daya tarik wisata budaya berbasis masyarakat.

2. Pariwisata Budaya

Pariwisata budaya merupakan bentuk perjalanan wisata yang bertujuan memperoleh pengalaman melalui interaksi dengan warisan budaya, tradisi, seni, sejarah, dan kehidupan masyarakat lokal. Menurut UNESCO, warisan budaya mencakup unsur berwujud (*tangible cultural heritage*) maupun tidak berwujud (*intangible cultural heritage*) yang memiliki nilai sejarah, identitas, dan keberlanjutan suatu masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata budaya harus mampu menjaga keaslian (*authenticity*) dan keberlangsungan nilai budaya agar tidak mengalami degradasi akibat aktivitas pariwisata.

Richards (2021) menjelaskan bahwa pariwisata budaya telah mengalami transformasi dari sekadar aktivitas menikmati objek budaya menjadi pengalaman yang bersifat partisipatif (*experiential tourism*), di mana wisatawan ingin berinteraksi secara langsung dengan masyarakat lokal dan memahami makna budaya yang mereka miliki. Sementara itu, McKercher dan Du Cros (2002) menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan wisata budaya ditentukan oleh keseimbangan antara pelestarian sumber daya budaya dengan kebutuhan industri pariwisata. Apabila orientasi ekonomi lebih dominan dibandingkan upaya konservasi budaya, maka akan muncul risiko komersialisasi budaya (*cultural commodification*) yang berpotensi mengurangi nilai autentisitas budaya lokal.

Sejalan dengan pandangan tersebut, UN Tourism (2024) menegaskan bahwa pengembangan pariwisata budaya harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal sebagai pemilik budaya melalui peningkatan kesejahteraan,

pelestarian identitas budaya, dan penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya. Berdasarkan sintesis berbagai teori tersebut, penelitian ini memandang bahwa pariwisata budaya merupakan sistem pengembangan destinasi yang memanfaatkan warisan budaya sebagai daya tarik utama dengan tetap menjaga autentisitas budaya, meningkatkan pengalaman wisatawan, serta memberikan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat lokal secara berkelanjutan.

3. Community Based Tourism (CBT)

Community Based Tourism (CBT) merupakan pendekatan pembangunan pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam seluruh proses pengembangan destinasi. Menurut Suansri (2003), CBT merupakan model pengelolaan pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengelolaan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan pariwisata. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan pelestarian lingkungan, budaya, dan nilai-nilai lokal.

Goodwin (2017) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi CBT tidak hanya ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan lokal, kepemimpinan komunitas, akses terhadap pasar, dan kemitraan dengan pemerintah maupun sektor swasta. Dengan demikian, CBT tidak sekadar melibatkan masyarakat sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah pengembangan destinasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

Prinsip-prinsip tersebut diperkuat dalam ASEAN Community Based Tourism Standard, yang menegaskan bahwa pengelolaan destinasi berbasis masyarakat harus memenuhi prinsip keberlanjutan melalui partisipasi masyarakat, pelestarian budaya, konservasi lingkungan, peningkatan manfaat ekonomi lokal, penguatan kelembagaan komunitas, serta peningkatan kualitas pelayanan wisata. Berdasarkan sintesis berbagai teori tersebut, penelitian ini memandang bahwa Community Based Tourism merupakan model pengelolaan destinasi yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya wisata melalui tata kelola yang partisipatif, kolaboratif, dan berorientasi pada pembangunan pariwisata berkelanjutan. Konsep ini menjadi landasan analisis dalam merumuskan model pengelolaan Kampung Adat Kaper sebagai daya tarik wisata budaya berbasis masyarakat di Desa Golo Bilas, Kabupaten Manggarai Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam model pengelolaan Kampung Adat Kaper sebagai daya tarik wisata budaya berbasis masyarakat di Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap fenomena pengelolaan destinasi berdasarkan pengalaman, persepsi, dan interaksi para aktor yang terlibat secara langsung dalam

pengelolaan kampung adat. Fokus penelitian diarahkan pada proses pengelolaan destinasi, peran para pemangku kepentingan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan Kampung Adat Kaper sebagai destinasi wisata budaya berbasis masyarakat.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena informan yang ditetapkan dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan Kampung Adat Kaper sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam. Informan penelitian terdiri atas tokoh adat, praktisi budaya, pemerintah desa, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan destinasi, yaitu Martinus Rubus selaku Tu'a Adat, Anselmus Jehuru sebagai praktisi Tari Caci Manggarai, Yohanes Jo'od sebagai praktisi adat, serta aparaturnya Pemerintah Desa Golo Bilas yang memiliki kewenangan dalam pengembangan pariwisata desa.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi fisik destinasi, aktivitas budaya, serta proses pengelolaan Kampung Adat Kaper. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh informasi yang komprehensif mengenai sistem pengelolaan, bentuk partisipasi masyarakat, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan destinasi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara melalui penelaahan dokumen, foto kegiatan, arsip, laporan, serta dokumen pendukung lainnya. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah, buku, dokumen pemerintah, laporan penelitian, dan berbagai referensi yang relevan dengan pengelolaan destinasi wisata budaya dan *Community Based Tourism*.

Teknik analisis data mengacu pada model analisis interaktif Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña (2014) yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*). Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, dilakukan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, yang didukung oleh peningkatan ketekunan pengamatan (*persistent observation*) serta perpanjangan keikutsertaan peneliti di lapangan. Melalui prosedur tersebut diharapkan data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi sehingga mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai model pengelolaan Kampung Adat Kaper sebagai daya tarik wisata budaya berbasis masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

(1) Model Pengelolaan Kampung Adat Kaper Berdasarkan Fungsi Manajemen

(a) *Planning (Perencanaan)*

Perencanaan (*planning*) merupakan fungsi manajemen yang menjadi dasar dalam menentukan arah pengembangan suatu destinasi wisata. Menurut George R. Terry, perencanaan adalah proses menetapkan tujuan, menyusun program, serta menentukan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan Kampung Adat Kaper, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Golo Bilas bersama lembaga adat dan Sanggar Kope Oles Todo Kongkol telah melakukan berbagai bentuk perencanaan dalam upaya mengembangkan Kampung Adat Kaper sebagai daya tarik wisata budaya. Bentuk perencanaan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan festival budaya tahunan, pengembangan atraksi budaya seperti Tari Caci, Rangkuk Alu, dan ritual Penti, promosi digital melalui media sosial, serta pengembangan produk kerajinan dan kuliner lokal sebagai bagian dari paket wisata budaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program tersebut telah memberikan arah yang positif terhadap pengembangan destinasi, khususnya dalam meningkatkan eksistensi Kampung Adat Kaper di tengah pesatnya perkembangan pariwisata Labuan Bajo. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, perencanaan tersebut masih bersifat operasional dan belum didukung oleh dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang yang memuat visi, misi, target pengembangan, indikator keberhasilan, pembagian tugas, serta strategi implementasi secara komprehensif. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar kegiatan masih bersifat insidental dan bergantung pada momentum kunjungan wisatawan maupun penyelenggaraan acara budaya tertentu.

Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi *planning* belum sepenuhnya memenuhi prinsip pengelolaan destinasi berkelanjutan sebagaimana dikemukakan oleh UN Tourism (2024), yang menekankan pentingnya *destination management plan* sebagai instrumen utama dalam mengintegrasikan aspek konservasi budaya, pemberdayaan masyarakat, pemasaran destinasi, dan keberlanjutan ekonomi lokal. Demikian pula, Global Sustainable Tourism Council (2023) menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola destinasi sangat dipengaruhi oleh adanya dokumen perencanaan yang menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan.

Apabila dibandingkan dengan penelitian Aini dkk. (2023), keberhasilan pengembangan desa wisata budaya ditentukan oleh keberadaan *masterplan* pengembangan destinasi yang disusun secara partisipatif bersama masyarakat. Berbeda dengan kondisi tersebut, Kampung Adat Kaper masih mengandalkan inisiatif pemerintah desa dan lembaga adat tanpa memiliki dokumen perencanaan yang terintegrasi. Oleh karena itu, penyusunan *masterplan* pengembangan Kampung Adat Kaper berbasis *Community Based Tourism* menjadi kebutuhan mendesak agar arah pengembangan destinasi lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

(b) *Organizing (Pengorganisasian)*

Fungsi pengorganisasian (*organizing*) bertujuan mengatur pembagian tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta koordinasi antaranggota organisasi agar tujuan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif. George R. Terry menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan proses membangun struktur organisasi yang mampu mengintegrasikan seluruh sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Kampung Adat Kaper dilaksanakan melalui kolaborasi antara Pemerintah Desa Golo Bilas, lembaga adat (*Wa'u Gendang*), dan Sanggar Kope Oles Todo Kongkol. Sanggar budaya bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan atraksi budaya, penerimaan tamu, dan pelayanan wisatawan, sedangkan lembaga adat bertanggung jawab menjaga keberlangsungan rumah adat, situs budaya, serta pelaksanaan ritual adat. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dalam mendukung promosi, penyediaan infrastruktur, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengorganisasian tersebut belum didukung oleh kelembagaan pariwisata yang formal. Hingga saat penelitian dilakukan, Kampung Adat Kaper belum memiliki Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai organisasi yang secara khusus bertanggung jawab terhadap pengelolaan destinasi wisata budaya. Akibatnya, pembagian tugas masih didasarkan pada kesepakatan informal sehingga beberapa fungsi manajemen, seperti pemasaran, pelayanan wisatawan, administrasi, serta evaluasi kegiatan, belum berjalan secara optimal.

Dalam perspektif *Community Based Tourism*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sebenarnya telah berlangsung cukup baik karena masyarakat terlibat sebagai pelaku atraksi budaya, pengrajin, pemandu wisata, dan penyelenggara kegiatan adat. Namun, partisipasi tersebut masih bersifat individual dan belum terintegrasi dalam suatu kelembagaan yang profesional. Goodwin (2017) menegaskan bahwa keberhasilan CBT sangat ditentukan oleh kekuatan organisasi masyarakat yang memiliki struktur, kepemimpinan, dan mekanisme koordinasi yang jelas. Hal serupa juga ditegaskan dalam ASEAN Community Based Tourism Standard, yang menyatakan bahwa kelembagaan lokal merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat.

Dengan demikian, pembentukan Pokdarwis atau lembaga pengelola destinasi yang melibatkan pemerintah desa, lembaga adat, sanggar budaya, kelompok perempuan, kelompok pemuda, dan pelaku UMKM menjadi strategi penting untuk memperkuat tata kelola Kampung Adat Kaper. Penguatan kelembagaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan koordinasi, efektivitas pengelolaan, serta keberlanjutan pengembangan destinasi wisata budaya.

(c) *Actuating (Pelaksanaan)*

Pelaksanaan (*actuating*) merupakan proses menggerakkan seluruh sumber daya organisasi agar mampu melaksanakan program yang telah direncanakan secara efektif. George R. Terry menjelaskan bahwa fungsi ini menekankan aspek

kepemimpinan, motivasi, komunikasi, dan partisipasi seluruh anggota organisasi dalam mencapai tujuan bersama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan Kampung Adat Kaper telah melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai aktivitas pariwisata budaya. Masyarakat berpartisipasi sebagai penari Tari Caci, pemain musik tradisional, pengrajin kain tenun, pemandu wisata lokal, serta penyelenggara berbagai ritual adat seperti Penti, Barong Wae, Barong Lingko, dan Barong Compang. Selain itu, Pemerintah Desa Golo Bilas secara aktif mendorong penyelenggaraan festival budaya, promosi digital, pengembangan produk ekonomi kreatif, serta kerja sama dengan biro perjalanan wisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Pelaksanaan berbagai program tersebut mencerminkan bahwa masyarakat tidak lagi berperan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek utama dalam pengelolaan destinasi wisata budaya. Temuan ini sejalan dengan konsep *Community Based Tourism* yang dikemukakan Suansri (2003), bahwa masyarakat lokal harus memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam seluruh proses pengelolaan destinasi sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kemampuan berbahasa asing, rendahnya kompetensi pelayanan wisata (*hospitality*), minimnya pelatihan pemanduan wisata, serta keterbatasan promosi digital yang dilakukan secara profesional. Kondisi tersebut menyebabkan pengalaman wisatawan belum sepenuhnya optimal, terutama bagi wisatawan mancanegara yang membutuhkan informasi budaya secara lebih mendalam.

(d) *Controlling (Pengawasan)*

Pengawasan (*controlling*) merupakan fungsi manajemen yang bertujuan memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut George R. Terry, pengawasan dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, pemberian umpan balik, serta tindakan korektif terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi selama proses pelaksanaan.

Berdasarkan hasil penelitian, fungsi pengawasan dalam pengelolaan Kampung Adat Kaper masih dilakukan secara sederhana melalui musyawarah adat yang melibatkan Tu'a Golo, lembaga adat, pengurus sanggar budaya, dan pemerintah desa setelah pelaksanaan kegiatan budaya maupun kunjungan wisatawan. Evaluasi lebih banyak difokuskan pada kelancaran penyelenggaraan acara adat, pelestarian nilai-nilai budaya, dan partisipasi masyarakat. Namun demikian, belum ditemukan sistem monitoring yang terstruktur, seperti standar operasional prosedur (SOP), indikator kinerja destinasi, evaluasi kepuasan wisatawan, maupun laporan pengelolaan destinasi secara berkala.

Dalam perspektif tata kelola destinasi berkelanjutan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi *controlling* masih perlu diperkuat. Menurut GSTC (2023),

pengawasan destinasi harus dilakukan secara berkelanjutan melalui indikator yang terukur, meliputi kualitas pelayanan, tingkat kepuasan wisatawan, konservasi budaya, dampak ekonomi bagi masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan. Sistem evaluasi yang baik akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dan penyempurnaan program pengembangan destinasi pada masa mendatang.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Desa Golo Bilas bersama lembaga adat membangun sistem pengawasan yang lebih sistematis melalui penyusunan SOP pengelolaan destinasi, pembentukan tim monitoring, evaluasi berkala terhadap kinerja pengelola, serta pengukuran kepuasan wisatawan. Penguatan fungsi pengawasan tersebut akan meningkatkan akuntabilitas tata kelola Kampung Adat Kaper sekaligus mendukung terwujudnya model pengelolaan wisata budaya berbasis masyarakat yang profesional, partisipatif, dan berkelanjutan.

(2) Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Kampung Adat Kaper Ditinjau dari Perspektif *Community Based Tourism*

Pendekatan *Community Based Tourism* (CBT) menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya pariwisata. Menurut Suansri (2003), keberhasilan pengembangan destinasi berbasis masyarakat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat, kekuatan kelembagaan lokal, pelestarian budaya, manfaat ekonomi, serta kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Goodwin (2017) menambahkan bahwa pengelolaan destinasi berbasis masyarakat harus mampu menciptakan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat, konservasi budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan Kampung Adat Kaper telah menunjukkan karakteristik *Community Based Tourism*, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas pengelolaan destinasi wisata budaya.

Faktor pendukung utama pengelolaan Kampung Adat Kaper adalah masih terpeliharanya keaslian budaya (*authenticity*) masyarakat Manggarai yang tercermin melalui keberadaan Mbaru Gendang, Compang, Lingko, Wae Barong, serta berbagai ritual adat seperti Penti, Barong Wae, Barong Lingko, dan pertunjukan Tari Caci. Keaslian budaya tersebut menjadi modal utama dalam membangun pengalaman wisata yang autentik sekaligus memperkuat identitas destinasi wisata budaya. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan atraksi budaya, pengelolaan sanggar budaya Kope Oles Todo Kongkol, serta dukungan Pemerintah Desa Golo Bilas dalam promosi, penyelenggaraan festival budaya, dan pengembangan produk ekonomi kreatif menunjukkan adanya penerapan prinsip partisipasi masyarakat sebagaimana ditekankan dalam konsep CBT. Keterlibatan masyarakat sebagai penari, pemandu wisata, pengrajin, dan pelaku UMKM juga memperlihatkan bahwa manfaat ekonomi pariwisata mulai dirasakan oleh komunitas lokal sehingga mendukung keberlanjutan pengelolaan destinasi.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan sejumlah faktor penghambat yang masih membatasi optimalisasi pengelolaan Kampung Adat Kaper. Kendala tersebut meliputi

keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya kemampuan bahasa asing, pelayanan wisata (*hospitality*), dan interpretasi budaya; belum terbentuknya kelembagaan pariwisata yang profesional seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); keterbatasan pendanaan untuk konservasi rumah adat dan pengembangan infrastruktur; serta rendahnya intensitas promosi dan pendampingan dari instansi terkait. Selain itu, persaingan dengan destinasi wisata budaya lain di Pulau Flores juga menjadi tantangan dalam meningkatkan daya saing Kampung Adat Kaper. Menurut Goodwin (2017), lemahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia merupakan salah satu penyebab utama belum optimalnya implementasi *Community Based Tourism*, karena masyarakat belum memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola destinasi secara profesional dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa model pengelolaan Kampung Adat Kaper telah mengadopsi prinsip-prinsip *Community Based Tourism*, terutama pada aspek partisipasi masyarakat, pelestarian budaya, dan pemanfaatan potensi lokal. Namun demikian, agar pengelolaan destinasi semakin efektif dan berkelanjutan, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan kepariwisataan, pembentukan kelembagaan pengelola yang lebih profesional, peningkatan kemitraan dengan pemerintah dan industri pariwisata, serta pengembangan sistem promosi digital yang lebih terintegrasi. Dengan penguatan aspek-aspek tersebut, Kampung Adat Kaper berpotensi berkembang sebagai destinasi wisata budaya berbasis masyarakat yang mampu menjaga kelestarian warisan budaya Manggarai sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan.

(3) Implikasi terhadap Pengembangan Pariwisata Budaya Berbasis Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Kampung Adat Kaper memiliki implikasi yang penting terhadap pengembangan pariwisata budaya berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*). Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam seluruh proses pengelolaan destinasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan manfaat ekonomi, hingga pelestarian budaya. Keberadaan Kampung Adat Kaper yang masih mempertahankan keaslian budaya Manggarai, seperti Mbaru Gendang, Compang, Lingko, ritual Penti, dan atraksi Tari Caci, merupakan modal sosial dan budaya yang memiliki daya saing tinggi sebagai produk wisata budaya. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan atraksi budaya, pengelolaan sanggar budaya, serta penyediaan produk ekonomi kreatif telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *Community Based Tourism*, yaitu partisipasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pelestarian budaya secara berkelanjutan.

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan Kampung Adat Kaper memerlukan penguatan tata kelola destinasi yang lebih kolaboratif melalui sinergi antara pemerintah desa, lembaga adat, Sanggar Kope Oles Todo Kongkol, masyarakat, pelaku usaha pariwisata, akademisi, dan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memperkuat kelembagaan pengelola,

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan *guiding*, pelayanan wisata (*hospitality*), pemasaran digital, dan interpretasi budaya, serta memperluas jejaring kerja sama dengan biro perjalanan wisata dan industri pariwisata. Di samping itu, penyusunan *masterplan* pengembangan destinasi berbasis masyarakat menjadi penting sebagai pedoman dalam pengembangan atraksi, konservasi budaya, pengelolaan kunjungan wisatawan, dan pengembangan produk ekonomi kreatif masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan prinsip *Community Based Tourism* yang dikemukakan Suansri (2003) dan Goodwin (2017), bahwa keberhasilan destinasi berbasis masyarakat sangat ditentukan oleh kekuatan kelembagaan lokal, partisipasi masyarakat, dan kemitraan antarpemangku kepentingan.

Dari perspektif akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pengelolaan destinasi wisata budaya dengan mengintegrasikan fungsi manajemen George R. Terry dan konsep *Community Based Tourism* dalam konteks kampung adat di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan pengelolaan kampung adat tidak hanya bergantung pada kekayaan budaya yang dimiliki, tetapi juga ditentukan oleh kualitas tata kelola, kapasitas kelembagaan, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pengembangan destinasi. Oleh karena itu, model pengelolaan Kampung Adat Kaper dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pengembangan destinasi wisata budaya berbasis masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat maupun di daerah lain yang memiliki karakteristik budaya serupa. Dengan demikian, pengembangan pariwisata budaya tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pelestarian warisan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta mewujudkan pembangunan pariwisata yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Kampung Adat Kaper sebagai daya tarik wisata budaya telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Perencanaan diwujudkan melalui pengembangan atraksi budaya, promosi digital, penyelenggaraan festival budaya, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pengorganisasian dilakukan melalui kolaborasi antara Pemerintah Desa Golo Bilas, lembaga adat, dan Sanggar Kope Oles Todo Kongkol, sedangkan pelaksanaan pengelolaan menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya dan penyelenggaraan aktivitas wisata. Namun demikian, fungsi pengawasan masih belum berjalan secara optimal karena belum didukung oleh sistem monitoring, evaluasi, dan kelembagaan pengelola yang profesional.

Ditinjau dari perspektif *Community Based Tourism* (CBT), Kampung Adat Kaper memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya berbasis masyarakat karena didukung oleh keaslian warisan budaya, keterlibatan aktif masyarakat, dan komitmen dalam melestarikan tradisi lokal. Akan

tetapi, pengelolaan destinasi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum terbentuknya Kelompok Sadar Wisata, keterbatasan pendanaan, infrastruktur yang belum memadai, serta belum optimalnya promosi dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola berbasis masyarakat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi multipihak, dan penerapan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan Kampung Adat Kaper sebagai destinasi wisata budaya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah Desa Golo Bilas bersama lembaga adat dan para pemangku kepentingan menyusun rencana induk (*masterplan*) pengelolaan Kampung Adat Kaper sebagai pedoman pengembangan destinasi wisata budaya yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan pembentukan kelembagaan pengelola yang lebih profesional, seperti Kelompok Sadar Wisata, disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan pemanduan wisata, pelayanan (*hospitality*), interpretasi budaya, dan pemasaran digital. Penguatan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat adat, pelaku usaha pariwisata, akademisi, dan media dalam mendukung promosi, konservasi budaya, pengembangan ekonomi kreatif, serta penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi unsur penting lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- [1] ASEAN. (2016). *ASEAN Community Based Tourism Standard*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- [2] Dianne Dredge, D., & John Jenkins, J. (2007). *Tourism Planning and Policy*. Milton, Australia: John Wiley & Sons.
- [3] Goodwin, H. (2017). *The Challenge of Overtourism*. Responsible Tourism Partnership.
- [4] Hall, C. M. (2008). *Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships* (2nd ed.). Harlow: Pearson Education.
- [5] Matthew B. Miles, M. B., A. Michael Huberman, A. M., & Johnny Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- [6] Geoffrey Wall, G., & Hilary Du Cros, H. (2002). *Cultural Tourism: The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management*. New York: Routledge.
- [7] I Gede Pitana, I. G., & Diarta, I. K. S. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [8] Richards, G. (2021). Rethinking cultural tourism. *Edward Elgar Handbook on Tourism and Culture*, 1–16.
- [9] Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Bangkok: Responsible Ecological Social Tours (REST).
- [10] Global Sustainable Tourism Council. (2023). *GSTC Destination Criteria Version 2.0*. Washington, DC: Global Sustainable Tourism Council.
- [11] UNESCO. (2003). *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. Paris
- [12] UNESCO. (2021). *Operational Directives for the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. Paris: UNESCO.

- [13] UN Tourism. (2024). *Tourism and Culture for Sustainable Development*. Madrid: UN Tourism.